

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LANTA
KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA****Wawan Mulyawan**

Universitas Mbojo Bima

wawanmulyawan22@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out the strategy of community empowerment in development activities in Lanta Village, Lambu District, Bima Regency; 2) To find out the stages of community empowerment in development activities in Lanta Village, Lambu District, Bima Regency; 3) To find out the follow-up of community empowerment in development activities in Lanta Village, Lambu District, Bima Regency. In discussing this research, researchers used descriptive qualitative research, with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. Determination of key informants using purposive sampling technique with the number of key informants as many as 5 (five) people. The results showed that community empowerment strategies in development activities in Lanta Village, Lambu District, activities to strengthen the knowledge that the community has in community empowerment and plan development activities that are physical and non-physical in Lanta Village, this can be seen from the level of enthusiasm, mutual cooperation and togetherness of the community in the implementation of development; Stages of community empowerment in development activities in Lanta Village, Lambu District, Bima Regency are very good, this can be seen from the level of togetherness, cooperation and activeness as well as very good community participation because the Village Government is always informed before carrying out activities, and; Follow-up of community empowerment in development activities in Lanta Village.

Keywords: Policy, Empowerment, and Community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 2) Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 3) Untuk mengetahui tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan key informan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling sengaja) dengan jumlah key informan sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stertegi pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu, Kegiatan memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan rencana kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik di Desa Lanta hal ini dapat diketahui dari tingkat antusias, gotong-royong dan kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sangat baik hal ini dilihat dari tingkat kebersamaan, kerjasama dan keaktifan serta partisipasi masyarakat yang sangat baik karena Pemerintah Desa selalu informasi sebelum melaksanakan kegiatan, dan; Tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa selama kegiatan tingkat partisipasi, kerjasama, serta kemauan masyarakat dalam mensukseskan dan melaksanakan pembangunan sangat baik.

Keywords; *Kebijakan, Pemberdayaan, dan Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis masyarakat di Desa Lanta Kecamatan Lambu harus menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan masyarakat Desa Lanta memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai actor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Secara universal istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Charles O. Jones bahwa istilah kebijakan (*policy term*) disamping digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal, dan *grand design*.

Robert Eystone mengatakan bahwa secara luas kebijakan public dapat didefinisikan "sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Sedangkan menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan public adalah "apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Namun dalam buku yang berjudul *what government do, why they do it, what differens it makes* tahun 1976, Dye dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan public adalah "studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut".

Richard Rose menyarankan bahwa “kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan ketimbang sebagai suatu keputusan sendiri” Menurut ealua dan Kenneth prewitt yang dikutip oleh Charles o. jones kebijakan adalah sebah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang bak oleh yang membuatnya maupun mereka yang mentaatinya. (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*). Budi winarno mengingatkan bahwa dala memndefiniskan kebijakan haruslah melihat apa yang seharuSnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupaka suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Strategi pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada: (1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan; (2) Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institutions* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi; (3) Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan; (4) Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru; (5) Lembaga swadaya masyarakat; (6) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan (Hempri Suyatno Suparjan, 2003:56).

Dalam pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat desa lanta kecamatan lambu kabupaten bima dalam pembangunan merupakan hal yang sangat mutlak dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Karena mereka akan memperoleh kesempatan untuk merencanakan, memutuskan, melaksanakan, dan memelihara kegiatan dan hasil pembangunan. Konsep pembangunan semacam ini disebut dengan konsep “*man-centred development*.”

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan adalah segi kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk tercapainya kondisi seperti ini, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1982:222), “itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.” Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mestinya berlangsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan. Implementasi pembangunan infrastruktur yang berupa rabat beton gang, Pemerintah Desa Lanta dan masyarakat melaksanakannya secara kolektif dan kolegal, dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat Desa Lanta cukup luar biasa karena semua unsur masyarakat ikut berpartisipasi dengan tujuan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program pambangunan agar berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah

sehingga tercipta masyarakat Desa Lanta yang sadar akan pentingnya pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dari beragam sektor salah satunya pengembangan kelompok tenun tradisional. Menurut Rifai dkk, 2022 mengatakan bahwa dinamika dari kebijakan ini cukup dinamis yang diantaranya adanya respon positif dari masyarakat terutama kelompok tenun tradisional proses yang dilalui adanya kebijakan ini cukup baik sehingga perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih produktif dan berfaedah.

Ismawan (Isbandi Rukminto Adi, 2002: 162-163), mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu; (1) program pengembangan sumber daya manusia, (2) program pengembangan kelembagaan lokal, (3) program pemupukan modal swasta, (4) program pengembangan usaha produktif, dan (5) program penyediaan informasi tepat guna.

B. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lanta Kecamatan Lambu sejak 20 Mei 2023. Penelitian deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya setelah data terkumpul. Penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan. Deskriptif kualitatif dimaksudkan dalam penelitian ini, menguraikan dan menggambarkan serta menganalisis jawaban dari key informan yang memberikan jawaban. Adapun jumlah key informan sebanyak 5 responden.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menyoroti strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan tentu harus ada partisipasi dari semua kalangan masyarakat, agar kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan dalam memberdayakan masyarakat berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya diri masyarakat, ada beberapa poin yang menjadi unsur utama yang harus diperhatikan *pertama*, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, *kedua*, lahirnya ide-ide baru dalam pelaksanaan pembangunan; dan *ketiga*, menerapkan teknologi yang tepat guna.

Dalam pembangunan, Pemerintah Desa dan masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan kemudian melaksanakan kegiatan secara gotong-royong. Dalam kaitan pembangunan partisipasi masyarakat perlu untuk ditingkatkan agar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sehingga melahirkan kesadaran, percaya diri, sikap mental, pengetahuan, tanggung jawab dan keterampilan. Untuk memberdayakan masyarakat pemerintah perlu merencanakan sebuah pembangunan. Pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Strategi pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban.

Memperkuat Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan karena dari pengetahuan inilah awal dari kemajuan pemahaman manusia dan mampu merubah keadaan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara optimal walaupun membutuhkan waktu yang relative lama karena perbedaan sifat dan perilaku manusia antara yang satu dengan yang lain. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing sehingga dapat diberdayakan dan bermanfaat bagi diri sendiri terutama orang lain. Untuk lebih spesifiknya lagi pengetahuan pemerintah desa memiliki program ceramah setiap bulan yang lahir dari tuntutan keadaan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat, sebab dari derasnya arus globalisasi banyak pemuda yang bertingkah diluar dari Agama, adat dan budaya bangsa Indonesia ini merupakan salah satu contoh pengaruh dari budaya dan teknologi budaya itu sendiri.

Rencana Kegiatan Pembangunan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik tentu harus diawali dengan perencanaan, masyarakat sebagai model dalam membangun sebuah wilayah/ Desa termasuk di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dalam perencanaan kegiatan fisik dan non fisik tentu membutuhkan kebersamaan masyarakat untuk ikut serta, dalam perencanaan dan pelaksanaannya kegiatan fisik membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan biaya yang banyak sehingga hasilnya akan memuaskan.

Perencanaan pembangunan berupa fisik dan non fisik merupakan wujud dari kebersamaan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena pembangunan fisik bagian dari majunya tata Wilayah serta non fisik merupakan terciptanya kebersamaan sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Maka dari itu dengan sendirinya perekonomian masyarakat dapat tumbuh dengan lengkapnya sarana dan prasarana fisik di Desa Lanta ini.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam tahap pemberdayaan peran dan ikut serta masyarakat sangat diharapkan guna mensukseskan semua program-program kegiatan pembangunan. Dengan berdasarkan pada paradigma baru yaitu perencanaan pembangunan dengan visi misi baru yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat maka perencanaan harus berawal dari Pemerintah Desa. Tujuan dari pembangunan sendiri yaitu berusaha melibatkan semua masyarakat agar dapat terus membudayakan kebersamaan. Pembangunan merupakan faktor terpenting dalam menunjang kelancaran perekonomian sehingga mampu menunjang taraf hidup masyarakat. Dalam tahapan pemberdayaan ini Pemerintah Desa harus mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Persiapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum melakukan suatu kegiatan maka ada perencanaan awal, pada tahap persiapan ini maka yang harus direncanakan adalah konsep yang matang oleh pelaku kegiatan agar selama pelaksanaan tidak mendapat hambatan yang dapat mengganggu terlaksananya kegiatan terutama kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kadang kala banyak kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah namun banyak masyarakat kurang paham disebabkan kurangnya pengetahuan tentang perencanaan dan ketidaktahuan bagaimana alur kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Dalam tahapan ini ada tiga unsur utama bentuk persiapan Pemerintah Desa dengan masyarakat seperti : *pertama*, mengikuti rapat atau musyawarah mufakat, *kedua*, kesiapan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, *ketiga*, survey lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan; dan, *keempat*, penentuan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun sumbangan masyarakat dalam persiapan ini yakni, tenaga, pikiran, ide dan lain sebagainya. sehingga apabila dalam pelaksanaannya nanti akan terlihat sesuai dengan keinginan bersama, guna memberdayakan masyarakat.

Tindak Lanjut Pemberdayaan Masyarakat

Dalam suatu program pemberdayaan masyarakat perlu adanya tindak lanjut karena merupakan bentuk dari implementasi kegiatan yang telah terlaksana, agar suatu program tidak dinikmati pada saat program dilakukan tetapi harus dimanfaatkan dalam jangka kurun waktu yang lama agar program pembangunan Pemerintah terus berjalan dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Konsekuensi kegiatan harus ada tindak lanjut sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia agar mampu secara mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan demikian upaya pemberdayaan pada dasarnya adalah membangun masyarakat yang mandiri dan ditandai oleh kondisi masyarakat yang cerdas, kreatif, terdidik, bertaqwa serta pengembangan dalam tahap pemberdayaan harus terus dilakukan agar hajatn maupun cita-cita Pemerintah tercapai karena agenda pembangunan infrastruktur di Desa perlu perhatian seluruh lapisan masyarakat yang ada agar pembangunan dirawat, dijaga; dan dimanfaatkan serta dinikmati lebih lama oleh masyarakat sebagai pengguna sekaligus dapat memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab melalui kegiatan pemberdayaan.

Tahap Pelaksanaan Dalam Pemberdayaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap paling krusial, dimana Pemerintah Desa dan masyarakat bekerja secara kolektif kolegial dalam kegiatan pembangunan sehingga tercapai program-program pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat: adanya keterlibatan masyarakat secara aktif untuk ikut membangun desa; dan, adanya sukarela masyarakat untuk turut serta membiayai program pembangunan. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa dan masyarakat sepakat melaksanakan kegiatan dan memberikan motivasi kepada oknum masyarakat yang

kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat ikut serta disetiap kegiatan. Keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam kegiatan pembangunan dengan sendirinya memberikan sebuah warna baru dalam kehidupan masyarakat terutama budaya gotong-royong.

Evaluasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dimana peninjauan mulai dilaksanakan kegiatan sampai pada proses akhir kegiatan akan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak baik Pemerintah Desa maupun masyarakat sebagai pelaksana kegiatan akan dilakukan evaluasi. evaluasi sendiri akan dilakukan lewat rapat antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dimana proses evaluasinya data-data yang tertulis maupun program yang telah jadi akan dikoreksi. Hasil dari rapat evaluasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat akan diserahkan pada Dinas terkait sebagai bukti tertulis yang sudah disahkan secara bersama antara penanggungjawab dengan pelaksana, meskipun program yang sudah dijalankan dengan baik tetapi masih terdapat kekurangan maupun hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

D. SIMPULAN

1), Stertegi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu, Kegiatan memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan rencana kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik di Desa Lanta hal ini dapat diketahui dari tingkat antusias, gotong-royong dan kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; 2), Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sangat baik hal ini dilihat dari tingkat kebersamaan, kerjasama dan keaktifan serta partisipasi masyarakat yang sangat baik karena Pemerintah Desa selalu bersosialisasi dan memberikan informasi baik melalui Masjid, Mushallah maupun papan informasi sebelum melaksanakan kegiatan, dan; 3), Tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa selama kegiatan tingkat parstisipasi, kerjasama, serta kemauan masyarakat dalam mensukseskan dan melaksanakan pembangunan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anderson, Op. Cit., hlm. 4.
- Suparjan, Hempri Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont, CA:Wadsworth, 1970).

- Charles O Jones, 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*, third edition, Monterey: books/cole publishing company, hlm. 25.
- dye Thomas R, 1975. *Understanding public policy*, second edition., Englewood cliff, N. J: prentice hall, hlm. 1
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7
- Grindle, S, Merille. 1980. *Politics and policy implementation in the third world*, Princeton, New Jersey: Princeton university press, hlm. 6
- Solichin Abdul Wahab, *Op. cit.*, hal. 2
- Randall B. ripley dan grece A. franklin, 1982. *Bireucracy and polcy implementation*, Homewood, Illiois, the dorsy press, hlm. 4
- Richard rose (ed), 1969. *Policy making in great Britain*, London: MacMilan, hlm. 79.
- Robert eyestone, 1971. *The tread of policy: a study in policy leadership*, *Indianapolis*: bobbs merril, hlm 18.
- Rifai, Junaidin, Taufik Irfadat. Kebijakan Pengembangan Usaha Kelompok Tenun Tradisional Di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; Jurnal Administrasi Negara Issn: 2598-4039 (Online) Issn: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022 <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/4777>
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani. 2004 : 77, *Pengertian Pemberdayaan* <http://chikacimoet.blogspot.com/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html> (di akses 18 september 2019)
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press, 2005
- Winarno budi, 2016. *Kebijakan public era globalisasi: teori, proses, dan stdi kasus komparatif*, center of academic publishing service (caps), yogyakarta